

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

- Ali, Hata M Dan Amran Saudi. 2014. Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arfa, Ananda Faisar Dan Watni Marpaung. 2016. *Metodeologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta : PT.Kharisma Putra Utama
- Chazaw, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada
- Dalle, Juhriyansyah. 2020. *Pengantar Teknologi Informasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Dewi Sartika, Ika. 2020. et al. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta: FH UBHARA PRESS.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dyah, Ochtorina S dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum Legal Reasearch*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Fajar Mukti Dan Yulianto Achmad. 2016. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hamzah, Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

- Ibrahim, Johnny. 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilyan, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkap Education
- Kasiyanto Agus. 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Marwan Awaludin. 2022. *Teori Hukum Progresif 4.0*. Yogyakarta: Thafa Media
- Mahmud, Marzuki Peter. 1983. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mukti, Fajar Dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Priyanto, Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditma
- Syamsuddin, Azis. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta; Sinar Grafika
- Setiadi, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Panintensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sholehuddin M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Duple Track System dan Implementasinya*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama,
- Maryono Y dan B. Patmi Istiana. 2008. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bogor: Quadra
- Yuntho, Emerson. 2014. , Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Setiyono. 2002. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Averros Press.

## **B. UNDANG – UNDANG**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia .

## **C. JURNAL**

Sanyoto. 2008. *“Penegakan Hukum Di Indonesia.”* Jurnal Dinamika Hukum.

Mudzakkir. 2011. *“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction)”*. Jurnal Legislasi Indo.

Pramono Widyo. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*. Kompas.

#### **D. SUMBER LAIN**

Putri, Ayu Anita. 2015. *Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Katalog Elektronik (E-Purchasing)*. Jember: Universitas Jember

Wahyuningsih, Rini. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.

#### **E. INTERNET**

*Teknologi Informasi Di Bidang Pemerintahan*,  
<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/08/teknologi-informasi-di-bidang-pemerintahan-seberapa-pentingnya/>. 8 November 2021.

*Kronologi Kasus Korupsi Pengadaan Proyek di Bakamla yang Seret 4 Tersangka*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/31/18444341/kronologi-kasus-korupsi-pengadaan-proyek-di-bakamla-yang-seret-4-tersangka>. 31 Juli 2019.

*Terbukti Korupsi, Mantan GM PT PLN Lampung Divonis 6 Tahun*.  
<https://news.detik.com/berita/d-1538778/terbukti-korupsi-mantan-gm-pt-pln-lampung-divonis-6-tahun>. 04 Januari 2011.

*Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022*.  
<https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>. 22 November 2022.

